



Republik Indonesia

1 (Satu) Tahun
Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim

2015

Pengantar

Perubahan iklim telah menjadi isu penting tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat daerah. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia termasuk salah satu yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) disusun untuk menjawab tantangan tersebut. Pada Februari 2014, RAN API diresmikan oleh BAPPENAS sebagai salah satu alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan yang sudah ada.

Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim baik di skala nasional, provinsi, maupun kota, disampaikan di dalam Buku Laporan ini. Beberapa capaian satu tahun setelah penerbitan RAN API sampai dengan awal tahun 2015, antara lain: (i) Integrasi RAN API ke dalam perencanaan pembangunan yaitu RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016; (2) Sosialisasi RAN API; (3) Lokakarya RAN API dengan 15 Daerah Percontohan; serta (4) Pembahasan indikator pemantauan dan evaluasi RAN API serta kaitannya dengan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan).

Seluruh rangkaian kegiatan di atas memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Dalam tahun ini, implementasi RAN API akan fokus melakukan pengarusutamaan program dan kegiatan di RKP 2016 serta pengembangan skema sistem pemantauan dan evaluasi. Tentunya implementasi RAN API di 15 daerah percontohan sampai 2019. Harapannya laporan ini dapat bermanfaat bagi para pelaku di tingkat nasional dan lokal untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Jakarta, Februari 2015
Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagai Penanggung Jawab Sekretariat RAN API

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
1. Latar Belakang	1
2. Integrasi RAN API ke Dalam Perencanaan Pembangunan	4
2.1 RAN API dalam RPJMN 2014-2019	5
2.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015	6
2.3 Pendanaan untuk RAN API	8
2.4 Kerjasama Sekretariat RAN API dengan ICCTF	8
3. Sosialisasi RAN API dan Lokakarya Daerah Percontohan	9
3.1 Sosialisasi RAN API untuk tingkat Provinsi di Jakarta, 27 Juni 2014	10
3.2 Sosialisasi RAN API untuk tingkat kabupaten/kota di Jakarta, 25 Agustus 2014	10
3.3. Sosialisasi RAN API di kabupaten/kota percontohan, Malang 23 September 2014	11
3.4 Sosialisasi RAN API di provinsi percontohan, Surabaya 17 November 2014	12
3.5 Sosialisasi RAN API di Kota-Kota Mitra PAKLIM-GIZ	12
3.6 Lokakarya Daerah Percontohan RAN API di Jakarta, 26 – 27 Februari 2015 ..	13

4.	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi RAN API	14
4.1	Penyusunan Indikator RAN API	15
a.	Indikator Ketahanan Pangan	15
b.	Indikator Kemandirian Energi	16
c.	Indikator Ketahanan Kesehatan	16
d.	Indikator Ketahanan Ekosistem	17
e.	Indikator Ketahanan Infrastruktur dan Perkotaan	17
f.	Indikator Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17
4.2	Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan	18
5.	Gambaran Umum Daerah Percontohan	19
5.1	Provinsi Sumatera Utara	20
5.2	Provinsi Sumatera Selatan	20
5.3	Provinsi Jawa Barat	21
5.4	Provinsi Jawa Timur	21
5.5	Provinsi Bali	21
5.6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	22
5.7	Kota Bandar Lampung	23
5.8	Kota Pekalongan	23
5.9	Kota Semarang	24
5.10	Kota Blitar	35
5.11	Kota Malang	25
5.12	Kota Batu	26
5.13	Kabupaten Malang	27
5.14	Kota Tarakan	28
6.	Penutup dan Tindak Lanjut	29
6.1	Tindak Lanjut	30
6.2	Program Satu Tahun Ke Depan	31
	Lampiran	32

1. Latar Belakang

Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, yang memerlukan strategi, baik itu strategi jangka pendek, menengah ataupun panjang. Hal tersebut dirasa perlu karena dampak perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan kerugian ekonomi di kemudian hari. Di Indonesia, dampak ekonomi dari perubahan iklim sangat besar walaupun masih sulit diperhitungkan secara pasti. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (*resilience*) masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim.

RAN API juga sudah merupakan dokumen perencanaan yang tersedia di berbagai Kementerian/Lembaga yang memerlukan sinergi agar sasaran adaptasi dapat tercapai dan ketahanan terhadap perubahan iklim dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pembangunan nasional dan daerah merupakan keniscayaan. Isu ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun sektoral yang diturunkan dalam program-program rencana aksi yang terpadu dan berkesinambungan.

Penyusunan RAN API ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang terkoordinir secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan swasta serta lainnya. Sedangkan tujuan dari adaptasi perubahan iklim adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Setahun setelah RAN API diterbitkan ada beberapa hal yang patut dicatat: 1) RAN API telah menjadi salah satu studi kasus NAP yang dibahas dalam COP 20 di Lima, Peru; 2) Beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Kota Blitar, serta Provinsi Sumatera Utara, telah menjadikan RAN API sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim dan RPJMD; 3) RAN API juga telah diacu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri KLHK tentang Adaptasi Perubahan Iklim; 4) Donor dan mitra pembangunan juga telah menggunakan RAN API dalam menyusun rencana kegiatan mereka.

Sesuai dengan dokumen RAN API, terdapat 5 (lima) bidang ketahanan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan, sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Ekonomi
 - a. Sub-bidang Ketahanan Pangan
 - b. Sub-bidang Kemandirian Energi
2. Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan
 - a. Sub-bidang Kesehatan

- b. Sub-bidang Pemukiman
- c. Sub-bidang Infrastruktur
- 3. Bidang Ketahanan Ekosistem
- 4. Bidang Ketahanan Wilayah Khusus
 - a. Sub-bidang Perkotaan
 - b. Sub-bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 5. Bidang Pendukung Yang Memadai

Mengingat sumber daya dan kapasitas Pemerintah Daerah yang terbatas, maka Pemerintah berinisiatif untuk melakukan kegiatan percontohan adaptasi perubahan iklim pada daerah yang rentan berdasarkan RAN API. Pemilihan daerah percontohan ini dilakukan berdasarkan pemetaan kajian kerentanan yang telah dilakukan oleh berbagai Kementrian/Lembaga, Mitra Pembangunan dan *Civil Society Organization* yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Lokasi percontohan tersebut terdiri atas 6 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat serta 7 kota yaitu Bandar Lampung, Pekalongan, Semarang, Blitar, Malang, Batu dan Tarakan serta Kabupaten Malang.

2. Integrasi RAN API ke Dalam Perencanaan Pembangunan

2.1 RAN API dalam RPJMN 2014-2019

Pada 8 Januari 2015, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014–2019 dengan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim termasuk ke dalam misi ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Agenda prioritas tersebut berisi (a) peningkatan kedaulatan pangan, (b) kedaulatan energi, (c) pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (d) pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, (e) penguatan sektor keuangan dan (f) penguatan kapasitas fiskal.

Dalam Buku I dokumen RPJMN 2015–2019, terutama pada Bab 6 tentang Agenda Pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim terdiri dari (a) mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN API dan kajian kerentanan daerah, (b) melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen RAN API terutama di 15 daerah rentan dan (c) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.

Secara Nasional, RAN API akan berada di bawah Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, khususnya Kelompok Kerja Adaptasi, yang dibentuk berdasarkan SK Menteri PPN/Bappenas No Kep 38/M.PPN/HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim. Kelompok Kerja ini bertanggung jawab dalam sinkronisasi rencana maupun implementasi program dan kegiatan terkait dengan adaptasi perubahan iklim sehingga mempunyai fokus dan lokus yang lebih terarah.

Untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah perlu disusun strategi adaptasi daerah di tingkat provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab masing-masing daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Strategi Adaptasi Daerah disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Adapun pengaturan kewenangan pemerintahan pada level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada UU No 32 tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007. Penyusunan program dan rencana aksi adaptasi dalam beberapa bidang perlu diselaraskan dengan pengaturan kewenangan sebagaimana dalam PP 38 tahun 2007.

2.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar)	Prakiraan Maju (Rp Milyar)				
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
KEGIATAN ADAPTASI								
BIDANG KESEHATAN								
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	0.11	0.11	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29
2	Penyehatan Lingkungan	0.31	0.31	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42
BIDANG EKONOMI								
1	Koordinasi Kebijakan Pangan	2.60	2.60	2.70	2.84	3.09	3.24	3.40
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
1	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya	4,217.08	4,217.08	5,823.84	11,001.66	11,378.67	10,232.52	10,744.15
2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	5,088.00	5,088.00	4,478.99	10,160.50	9,656.27	8,223.24	8,634.40
3	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai	5,621.53	5,621.53	3,887.00	28,910.54	22,669.74	18,578.69	19,507.62
BIDANG KETAHANAN PANGAN								
1	Penguatan Perindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	192.29	192.29	192.29	200.96	208.21	218.30	229.22
2	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	105.82	105.82	105.82	110.58	115.56	120.76	126.80
3	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1,330.61	1,330.61	1,330.61	1,392.45	1,446.08	1,516.16	1,591.97
4	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	536.97	536.97	536.97	552.83	565.90	593.32	622.99
5	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	13.36	13.36	13.36	13.96	14.46	15.17	15.93
6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	95.81	95.81	95.81	100.60	105.63	110.91	116.46
7	pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	108.36	108.36	108.36	113.23	117.31	122.94	129.09
8	Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	108.35	108.35	108.35	203.45	214.75	218.96	229.91

9	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	40.26	40.26	40.26	40.26	43.75	45.71	48.00
10	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	1,236.31	1,236.31	1,236.31	1,299.00	1,345.84	1,411.06	1,481.61
11	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	134.96	134.96	134.96	130.44	128.67	128.40	134.82
12	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	120.20	120.20	120.20	125.61	131.27	137.17	144.03
13	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	203.00	203.00	203.00	212.71	223.35	234.51	246.24
14	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	27.96	27.96	27.96	29.22	30.53	31.90	33.50
15	Dukungan Perlindungan Perkebunan	95.68	95.68	95.68	99.82	103.42	108.43	113.85
16	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	24.33	24.33	24.33	25.42	26.56	27.76	29.15
BIDANG SISTEM PENDUKUNG DAN KETAHANAN EKOSISTEM								
1	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	75.46	75.46	76.77	80.61	84.64	88.87	93.31
2	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	37.30	37.30	40.63	42.66	44.79	47.03	49.38
3	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	174.05	174.05	84.42	190.78	200.31	210.33	220.85
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	87.35	87.35	48.21	81.36	81.64	81.94	86.04
5	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	56.40	56.40	44.00	46.20	48.51	50.94	53.48
6	Peta Tematik Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional			7.20	7.40	7.60	7.80	8.19
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	9.00	9.00	8.00	8.30	8.71	9.15	9.60
2	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	6.29	6.29	10.87	17.74	18.62	19.55	20.53
3	Adaptasi Perubahan Iklim	22.52	22.52	4.00	6.32	6.37	6.97	7.32
4	Pendayagunaan pesisir dan lautan	32.10	32.10	10.00	11.75	12.54	13.36	14.03
5	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	1.76	1.76	2.09	3.59	3.95	4.15	4.36
TOTAL		19,768.83	19,768.83	18,855.72	55,174.94	48,995.00	42,565.08	44,693.33

2.3 Pendanaan untuk RAN API

Dalam pelaksanaan RAN API, kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan K/L teknis terkait telah mengimplementasikan RAN API melalui mekanisme transfer dana dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan di area percontohan RAN API yang didukung mitra pembangunan seperti JICA, ADB, UNDP atau Mercy Corps Indonesia. Sebagian kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan daerah menggunakan dana APBD. Sesungguhnya masih banyak kegiatan adaptasi lain yang telah dilakukan oleh masyarakat dan swasta yang tidak terdaftar dalam RAN API, dana yang mereka gunakan mungkin lebih besar dari dana pemerintah. Sebagai contoh, dana yang digunakan masyarakat dan swasta untuk menanggulangi banjir tahun 2014 sudah lebih dari 5 triliun rupiah (Sumber: BNPB). Jumlah dana keseluruhan yang digunakan untuk adaptasi belum dapat dihitung karena belum ada batas yang jelas antara kegiatan rutin yang sudah ada dan kegiatan yang khusus adaptasi, selain itu belum semua kegiatan adaptasi dilaporkan ke Pemerintah.

2.4 Kerjasama Sekretariat RAN API dengan ICCTF

Fasilitas pendanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan efektif adalah melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Adanya kesamaan tujuan untuk meningkatkan resiliensi iklim di Indonesia membuat ICCTF dan Sekretariat RAN API bekerjasama dalam beberapa kegiatan seperti: penyusunan *business plan* ICCTF 2014-2019; Pengembangan *project pipeline* untuk *adaptation window*; dan kajian kesesuaian RAN API dalam draft RPJMN 2015-2019 serta beberapa kegiatan lain. *Adaptation window* di ICCTF dan Sekretariat RAN API saling membutuhkan. ICCTF memerlukan informasi tentang: kebutuhan dan prioritas adaptasi di tingkat nasional dan daerah; kegiatan yang tengah dikerjakan oleh kementerian/lembaga dan mitra pembangunan; dan hasil monitoring dan evaluasi RAN API. RAN API juga membutuhkan fasilitas pendanaan untuk kegiatan yang belum didanai oleh APBN. Kedepannya diharapkan kerjasama antara RAN API dan ICCTF dapat ditingkatkan lagi.

3. Sosialisasi RAN API dan Lokakarya Daerah Percontohan

Implementasi RAN API dimulai dengan kegiatan “**Sosialisasi RAN API**” ke daerah, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman ke pemerintah daerah mengenai aksi-aksi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan kegiatan “**Lokakarya Daerah Percontohan RAN API**” dimaksudkan sebagai pertemuan awal rencana dan strategi implementasi RAN API 2015-2019.

3.1 Sosialisasi RAN API untuk tingkat Provinsi di Jakarta, 27 Juni 2014

Sosialisasi RAN API ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK. Sosialisasi dilakukan dengan penyampaian RAN API oleh Tri Dewi Virgiyanti dari Direktorat Lingkungan Hidup; materi mengenai ketersediaan data iklim untuk mendukung kajian kerentanan di daerah oleh BMKG; pemaparan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) untuk penguatan kajian kerentanan di daerah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 1. Sosialisasi RAN API bersamaan dengan PEP RAD GRK

3.2 Sosialisasi RAN API untuk tingkat kabupaten/kota di Jakarta, 25 Agustus 2014

Sosialisasi RAN API ini dilaksanakan pada acara *Knowledge Management Forum* (KMF) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) dan Mercy Corps Indonesia. Pada acara tersebut, Wahyuningsih Darajati, selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan mekanisme alokasi pendanaan untuk kegiatan

perubahan iklim terutama untuk adaptasi perubahan iklim. Pada kesempatan tersebut, Sekretariat RAN API juga menyampaikan kerangka implementasi RAN API untuk tahun 2014. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menyampaikan skema SIDIK.



Gambar 2. Direktur Lingkungan Hidup sedang Menyampaikan Alokasi dan Mekanisme Pendanaan dalam RAN API

3.3 Sosialisasi RAN API di kabupaten/kota percontohan, Malang 23 September 2014

Sosialisasi RAN API di kabupaten/kota percontohan dilaksanakan bersamaan dengan acara pertemuan jejaring antar kabupaten/kota percontohan GIZ PAKLIM. Dalam pertemuan tersebut Sekretariat RAN API menyampaikan paparan mengenai RAN API, yaitu dokumen, strategi dan kerangka implementasi RAN API. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kota Malang, Kota Batu, Kota Blitar dan Kabupaten Malang yang juga merupakan lokasi daerah percontohan RAN API .



Gambar 3. Suasana diskusi pada Saat Sosialisasi RAN API di Kota Malang

3.4 Sosialisasi RAN API di provinsi percontohan, Surabaya 17 November 2014

Sosialisasi RAN API dilaksanakan bersamaan dengan Diskusi Terarah Provinsi Jawa Timur dalam merespon perubahan iklim. Pada acara tersebut, Sekretariat RAN API mewakili Bappenas menyampaikan posisi RAN API dalam RPJMN 2015-2019 serta strategi dan kerangka kerja RAN API itu sendiri. Dalam kesempatan ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur menyampaikan paparan mengenai respon RPJMD dan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, paparan dari BMKG di Surabaya, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengenai peran sertanya dalam merespon perubahan iklim. Kegiatan sosialisasi ini mendapat dukungan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).



Gambar 4. Sosialisasi RAN API di Surabaya

3.5 Sosialisasi RAN API di Kota-Kota Mitra PAKLIM-GIZ

Kegiatan sosialisasi RAN API dilaksanakan PAKLIM-GIZ di 3 lokasi berbeda, yaitu Sukoharjo pada tanggal 2 Desember 2014, Kota Pekalongan 4 Desember 2014, dan Kota Malang 10 Desember 2014. Sosialisasi ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kota Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Total peserta yang hadir sebanyak 69 orang dari berbagai SKPD dan LSM lokal. Dalam seminar ini diisi pula dengan presentasi dari Tri Virgiyanti (Bappenas), Dr. Perdinan (CCROM-IPB), dan Moh. Nurhadi (PAKLIM-GIZ). Peserta memberikan respon yang baik dan menunjukkan minat untuk membuat rencana aksi adaptasi serupa di daerahnya.

3.6 Lokakarya Daerah Percontohan RAN API di Jakarta, 26 – 27 Februari 2015

Pelaksanaan lokakarya daerah percontohan RAN API dimaksudkan untuk mendorong implementasi RAN API di 15 daerah percontohan yang telah ditentukan. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas yang dihadiri oleh 13 perwakilan daerah percontohan yaitu 6 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat), 6 kota (Bandar Lampung, Pekalongan, Semarang, Malang, Batu, Blitar, Tarakan) dan Kabupaten Malang. Pokok-pokok arahan yang disampaikan antara lain (a) integrasi aksi adaptasi dalam RPJMD dan Renstra SKPD; (b) Sinergi kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di lokasi daerah percontohan RAN API; (c) Koordinasi implementasi kegiatan adaptasi di 15 daerah percontohan (pusat – daerah dan antar daerah, serta mendukung peningkatan kapasitas, transfer teknologi dan dukungan pendanaan; dan (d) Fasilitasi pelaksanaan kajian kerentanan di daerah lain serta penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di daerah. Agenda pada hari pertama dilanjutkan dengan presentasi dari Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada hari kedua, masing-masing perwakilan 13 daerah percontohan yang hadir menyampaikan program kerja yang sudah dilaksanakan, yang sedang berjalan dan yang direncanakan untuk kemudian disinkronkan dengan program dan kegiatan K/L.



Gambar 5. Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas yang didampingi oleh Direktur Lingkungan Hidup sedang Menyampaikan Arahan pada Acara Pembukaan Lokakarya Daerah Percontohan RAN API

4. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi RAN API

Untuk memastikan pencapaian target dan sasaran RAN API ini perlu ada proses monitoring, evaluasi dan pelaporan yang jelas dan terintegrasi mengingat aksi adaptasi perubahan iklim merupakan program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektoral. Dalam hal ini, proses monitoring pelaksanaan kegiatan RAN API dilakukan oleh K/L terkait namun secara berkala dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Dalam dokumen RAN API, belum terdapat penjelasan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang akan digunakan, sehingga dalam usaha penyempurnaan dokumen tersebut telah dimulai upaya pengembangan Kerangka Kerja Monev RAN API. Pentingnya pengembangan kerangka tersebut adalah untuk memastikan tercapainya tujuan utama RAN API, yaitu berkurangnya dampak negatif dari perubahan iklim dan meningkatnya resiliensi sistem sosial ekonomi dan ekologis terhadap perubahan iklim. Seperti yang diketahui faktor utama resiliensi iklim adalah kemampuan absorptif, adaptif dan transformatif. Kemampuan absorptif ditentukan oleh tingkat kerentanan suatu sistem, sedangkan kemampuan adaptif dan transformatif ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengelola dirinya sendiri dengan potensi yang dimiliki.

Dalam pengembangan sistem tersebut, metode yang merekomendasikan adalah *result base monitoring and evaluation* yang perlu diterjemahkan ke dalam sebuah *result chain* yang komprehensif, kemudian dilakukan penentuan indikator atau indeks yang akan digunakan. Dalam rangka mengembangkan sistem monev RAN API ini, Sekretariat RAN API sedang melakukan penyusunan indikator bidang RAN API dengan melibatkan tim ahli dan pemangku kepentingan yang lain.

4.1 Penyusunan Indikator RAN API

Dalam proses Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAN API diperlukan adanya indikator ukuran keberhasilan berupa indikator RAN API, yang diarahkan tetap mengacu kepada indikator pembangunan yang ada. Proses penyusunan indikator ini dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan K/L terkait melalui bantuan dari UNDP melalui *Project Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience Rural Communities* (SPARC). Indikator yang telah tersusun ini mengacu kepada indikator pembangunan dan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat digunakan di berbagai tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota ataupun lokal) maupun sebagai alat ukur untuk mengukur berkurangnya kerentanan, dan peningkatan resiliensi iklim. Hingga saat ini telah diinformasikan indikator untuk sub-bidang: Ketahanan Pangan, Kemandirian Energi; Ketahanan Kesehatan; Ketahanan Pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan Ketahanan Ekosistem. Sedangkan untuk indikator subbidang Permukiman, Perkotaan dan Infrastruktur masih dalam pembahasaan. Indikator-indikator tersebut kemudian nantinya akan digunakan sebagai elemen dari indeks resiliensi iklim.

a. Indikator Ketahanan Pangan

Indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah:

1. Ketersediaan pangan, terdiri atas (a) jumlah produksi dan produktivitas, (b) diversifikasi tanaman pangan, (c) luasan lahan gagal panen, (d) jumlah penduduk rawan pangan per tahun, (e) tingkat ketersediaan cadangan pangan dan (f) tersedianya infrastruktur, teknologi dan kelembagaan pasca panen.
2. Akses Pangan dan Penghidupan, terdiri atas (a) persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, (b) jumlah dan kualitas sarana dan pra sarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan, (c) jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat, (d) PDB/PDRB Perikanan dan Pertanian serta (e) Harga bahan pangan utama.
3. Pemanfaatan pangan, terdiri atas (a) prevalensi balita dengan berat badan rendah dan gizi buruk, (b) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan (c) konsumsi pangan per kapita

b. Indikator Kemandirian Energi

Indikator untuk mengukur kemandirian energi adalah:

1. Indikator ketersediaan, terdiri atas (a) jumlah produksi energi yang sumbernya sensitif terhadap parameter iklim, (b) ketersediaan bahan baku pembangkitan energi yang transportasinya dipengaruhi oleh gangguan iklim, (c) nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana hidro-meteorologis, (d) luasan lahan rehabilitasi dan reklamasi hutan di daerah DAS dan (e) produktivitas jenis tanaman kayu energi
2. Indikator Akses, terdiri atas (a) durasi pemadaman listrik/gas akibat bencana hidro-meteorologi dan (b) penurunan intensitas energi di sektor rumah tangga dan industri pada saat terjadinya bencana hidro-meteorologi
3. Indikator Keberlanjutan, yaitu jumlah desa yang memanfaatkan sumber EBT di wilayah-wilayah rawan bencana hidro-meteorologi

c. Indikator Ketahanan Kesehatan

Indikator ketahanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator penduduk yang menderita malnutrisi, yaitu prevalensi balita dengan berat badan rendah/gizi kurang dan buruk
2. Indikator penurunan angka kematian, terdiri atas (a) Angka Kematian Bayi dan Balita per 1000 kelahiran dan (b) Tingkat kematian akibat cuaca ekstrem dan bencana hidro-meteorologi
3. Indikator pengendalian penyebaran penyakit dan penurunan jumlah kasus baru, terdiri atas (a) prevalensi penyakit yang dibawa oleh vektor, (b) prevalensi penyakit yang disebarkan melalui udara dan (c) prevalensi penyakit yang disebarkan melalui air
4. Indikator sarana dan pra-sarana kesehatan, terdiri atas (a) presentase kecamatan

dengan kesiapan pelayanan kesehatan tingkat pertama, (b) persentase kabupaten/kota dengan akses pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan (c) persentase ketersediaan vaksin dan obat di seluruh fasilitas farmasi kabupaten

5. Indikator kesehatan lingkungan yaitu presentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan
6. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini, terdiri atas (a) jumlah provinsi yang menggunakan sistem peringatan dini, (b) jumlah desa yang mengembangkan *Participatory Adaptation Climate Change Transformation* dalam menyusun rencana aksi adaptasi masyarakat untuk bidang kesehatan dan (c) Tersedianya peta kerentanan iklim bidang kesehatan tingkat nasional
7. Regulasi, kapasitas kelembagaan dan IPTEK, terdiri atas (a) adanya kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi yang berorientasi pada adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan dan (b) jumlah produk/penelitian bidang kesehatan terkait perubahan iklim

d. Indikator Ketahanan Ekosistem

Indikator untuk mengukur ketahanan ekosistem masih dalam proses diskusi terkait dengan adanya tipologi ekosistem dan indikator yang sama dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

e. Indikator Ketahanan Infrastruktur dan Perkotaan

Indikator untuk mengukur ketahanan infrastruktur dan perkotaan masih dalam proses diskusi.

f. Indikator Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator untuk mengukur ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

1. Indikator Peningkatan Kesejahteraan dan kesiapan usaha masyarakat kelautan dan perikanan dan pulau kecil, terdiri atas (a) rata-rata pembudidaya ikan, nelayan tangkap, pengolah ikan dan petambak garam, (b) adanya sumber pendapatan alternatif bagi pelaku, (c) ketersediaan informasi mengenai cuaca ekstrim, (d) jumlah unit pembenihan dan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar cara budidaya ikan yang baik, (e) Jumlah kapal dan alat penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan, (f) Jumlah petambak garam rakyat yang menerapkan teknologi adaptif dan sistem kelembagaan yang mendukung produksi garam Kualitas Produksi 1, (g) Ragam produk olahan bernilai tambah, (h) Jumlah pelaky usaha dan masyarakat pulau kecil yang dilatih dan disuluh tentang mitigasi bencana hidro-meteorologi dan adaptasi perubahan, (i) Jumlah desa pesisir tangguh, (j) Panjang pra-sarana pelindung pantai yang dibangun dan dipelihara dan direhabilitasi, (k) Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi peningkatan kualitas lingkungannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan (l) Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi sarana/pra-sarana air bersih.

2. Indikator Peningkatan pengelolaan SDKP secara berkelanjutan, terdiri atas (a) Jumlah pulau kecil dan luasan kawasan yang terfasilitasi rehabilitasi ekosistem dan (b) Tersedianya peta kerentanan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau kecil

4.2 Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan CCROM-IPB dan Mercy Corps Indonesia tengah mengembangkan dan menyempurnakan suatu sistem yang dapat mengukur dan memperlihatkan tingkat kerentanan suatu wilayah. Sistem ini dinamakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Sistem ini diharapkan dapat mengevaluasi efektifitas program pengurangan risiko dan peningkatan resiliensi iklim. Input yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) BPS dan sumber data lain yang dianggap relevan, serta data curah hujan. Data ini kemudian diproses dengan memperhitungkan bobot dari masing masing indikator yang menghasilkan indeks sensitifitas dan keterpaparan, indeks kapasitas adaptasi dan indeks risiko (banjir dan kekeringan). Satuan unit analisis terkecil dalam SIDIK adalah desa yang kemudian data dari level desa tersebut dapat digabungkan untuk membuat peta kerentanan kabupaten atau provinsi.

Keunggulan SIDIK adalah pendekatannya yang berbasis wilayah, dalam hal ini resiliensi dilihat dengan basis kewilayahan sehingga sebaiknya tidak dilihat secara sektoral. Meskipun RAN API disusun secara sektoral dengan kelima bidang utamanya, namun tujuan utamanya adalah peningkatan resiliensi yang memerlukan informasi berbasis wilayah; jadi SIDIK sangat berguna untuk proses monitoring dan evaluasi RAN API. Jika SIDIK menggunakan indikator yang tepat dan data yang akurat, maka analisa kerentanan ini akan menjadi *tools* yang sangat efektif. Mengingat hal tersebut, rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat penyempurnaan SIDIK patut didukung oleh berbagai pihak. Dalam menjalankan SIDIK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan kerja sama dengan BPS, BNPB, BIG, BMKG dan juga kementerian/ lembaga sektoral terkait.

5. Gambaran Umum Daerah Percontohan

5.1 Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi penghasil beras terbesar ke-5 di Indonesia. Menghadapi iklim ekstrim, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Untuk kepentingan strategis ini, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai upaya pengamanan produksi beras di Sumatera Utara tahun 2012–2020. Sebagai pelaksana program di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian menerapkan strategi dalam rangka implementasi program adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan produksi beras di Sumatera Utara.

Sasaran Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di Sumatera Utara adalah (a) meningkatkan produksi beras sebesar 3-5% per tahun, (b) mempertahankan status swasembada beras, (c) meningkatkan indeks pertanian (IP) padi, (d) meningkatkan luas lahan dan luas tanam dan (e) meningkatkan pendapatan petani. Sasaran program tersebut telah diturunkan dalam induk program aksi adaptasi dan institusi pelaksana program sebanyak 22 program dengan melibatkan dinas terkait maupun instansi vertikal seperti BMKG, BPTP, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, PU Pengairan (PSDA), Bakorluh, PT Pertani dan kelompok masyarakat petani. Proses pemantauan evaluasi tersebut telah disusun dalam bentuk laporan Implementasi Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai upaya pengamanan produksi beras di Sumatera Utara tahun 2010-2020 dengan mendapat pendampingan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

5.2 Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan misi keempat Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 yaitu meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana, maka dituangkan dalam tujuh strategi dan arah kebijakan. Penyusunan RPJMD ini telah melalui proses pengarusutamaan dokumen Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilakukan tahun 2010 yang merupakan kerjasama KLH, AUSAID dan GIZ. Proses penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui sinergi dengan RAD GRK dilakukan melalui kerjasama dengan JICA. Beberapa sasaran sektor pembangunan tahan perubahan iklim adalah (a) peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, (b) pengelolaan pengairan, (c) pengelolaan wilayah dan (d) peningkatan kesehatan.

Berdasarkan pada bidang dalam RAN API, Sumatera Selatan mengusulkan usulan strategis di bidang (a) ketahanan pangan berupa peningkatan produksi pertanian pasang surut dan asuransi pertanian terutama di daerah pasang surut, (b) bidang ketahanan ekosistem melalui keberlanjutan ketersediaan air, konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati pesisir dan gambut, (c) bidang wilayah khusus dalam penataan ruang di kabupaten dan kota pesisir, (d) bidang sistem kehidupan difokuskan ke wilayah pesisir dan (e) sistem pendukung melalui penguatan informasi iklim dan PEP.

5.3 Provinsi Jawa Barat

Provinsi ini memiliki banyak kajian adaptasi di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai kerja sama dengan berbagai pihak (kerjasama KLH, ABD dan CCRUM IPB), yaitu Kabupaten Indramayu (2013), Kabupaten dan Kota Cirebon (2012), Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Selain itu ada beberapa kajian detail terkait perubahan iklim seperti desa model adaptasi terhadap kenaikan muka air laut di Pondok Bali, Kabupaten Subang.

Kegiatan pemerintah daerah dalam merespon dampak perubahan iklim telah tercermin program dan kegiatan di SKPD yang ada, didukung dengan adanya tim koordinasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan melalui dukungan APBD provinsi tahun 2015 adalah (a) kegiatan-kegiatan di bidang RAN API, (b) Penyusunan Rencana Induk Adaptasi Perubahan Iklim di Jawa Barat dan (c) Fasilitasi dan Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim di OPD Pokja RAD GRK Jawa Barat.

5.4 Provinsi Jawa Timur

Meskipun belum dilakukan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim secara khusus, RTRWP tahun 2011-2013 telah memberikan fokus pada adaptasi perubahan iklim terutama di kawasan pesisir dan kehutanan serta kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan dan fungsi lingkungan. Beberapa kota di Jawa Timur telah memiliki dokumen adaptasi perubahan iklim terutama kota-kota yang bekerja sama dengan mitra pembangunan, seperti Malang, Blitar, Batu, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto serta Kabupaten Malang dan Probolinggo (GIZ dan ACCRN Mercy Corps Indonesia).

Beberapa kegiatan di tahun 2015 terkait adaptasi perubahan iklim adalah (a) identifikasi kerentanan/resiko dan upaya adaptasi perubahan iklim di Jawa Timur dan (b) Kajian Dampak akibat adanya kebakaran hutan di wilayah Bromo Tengger dan Semeru dalam upaya mendukung adaptasi perubahan iklim. Selain itu, mitra pembangunan seperti JICA, *Ministry of Environment* Jepang serta APIK Program dari USAID telah melakukan diskusi terarah pada tahun 2014 untuk implementasi tahun 2015 dan selanjutnya.

5.5 Provinsi Bali

Kajian kerentanan di Provinsi Bali disusun oleh BMKG dan JICA pada tahun 2013 terutama sebagai panduan untuk mengetahui tingkat keterpaparan (*exposure*) dan tingkat kerentanan perubahan iklim terhadap sektor pertanian (produktivitas padi). Dari hasil kajian menunjukkan metode pengembangan indeks dan peta kerentanan dengan pendekatan normatif kuantitatif dan kualitatif. Keterpaparan sebagai potensi bencana dipresentasikan dengan peta kesesuaian tanah, iklim dan peta tersebut mengidentifikasi perubahan

iklim di Bali. Sensitivitas digambarkan sebagai lokasi pertanaman padi. Kapasitas adaptasi disetimasikan dengan model regresi faktor-faktor sosial terkait produksi padi. Peta akhir tersebut telah berhasil mengindikasikan daerah-daerah yang rentan terhadap penurunan produksi padi karena perubahan iklim yaitu wilayah-wilayah di bagian timur laut, tengah, barat dan Tabahan.

Hasil kajian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kebijakan seperti pelatihan pertanian, karena dengan pelatihan pertanian dapat meningkatkan produksi padi lebih dari 4 kg per are pembuat keputusan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi petani padi dengan memperkuat program pelatihan pertanian yang telah berkurang. Disamping itu hasil kajian kapasitas adaptasi perubahan iklim akan digunakan untuk mengkaji kerentanan produksi padi. Kajian ini memerlukan dua komponen lagi yaitu keterpaparan terhadap dampak iklim dan sensitivitas terhadap dampak perubahan iklim. Untuk memanfaatkan kajian kerentanan ini pada masa yang akan datang diperlukan kajian berkelanjutan dan keterlibatan stakeholder. Pada umumnya petani yang kurang mampu harus mendapat perhatian yang lebih banyak pada kajian kerentanan karena dari hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa mereka rentan terhadap iklim terkini dan bahwa efek buruk perubahan iklim akan menyebabkan mereka lebih menderita. Menyediakan informasi iklim secara benar kepada petani dan mengembangkan peta kerentanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang akan membantu untuk mendukung petani dan pembuat keputusan dengan menyediakan informasi kerentanan yang komprehensif merupakan suatu hal penting yang perlu dilakukan.

5.6 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi ini merupakan provinsi pertama yang memiliki kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim dengan fokus di Pulau Lombok yang dilakukan melalui kerjasama KLH, WWF dan GTZ pada tahun 2009. Kajian ini dimulai dengan sain basis untuk pemodelan peningkatan muka air laut maupun klimatologi dan diperkuat dengan perumusan strategi adaptasi berdasarkan resiko yang diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan seperti RPJMD, RTRW dan sebagainya.

Beberapa program terobosan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dimulai tahun 2008 adalah (a) Gerakan NTB Hijau yaitu sekolah hijau, hutan cadangan energi dan ketahanan pangan dalam kawasan hutan, (b) Gerakan Permata yaitu PER-lindungan MATA Air khususnya pada kawasan-kawasan yang terdapat sumber mata air yang perlu dilindungi, (c) Pembentukan Desa Mandiri Energi dan (d) Gerakan Ruang Hijau yaitu RUANG Hunian Ideal yang dibentuk dengan Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas yang memadai.

5.7 Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung dengan luas area berkisar 169,21 km². Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung di tahun 2013 mencapai nilai 7.596.115 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Tim Kota Bandar Lampung, dibawah skema Program *Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)* – Mercy Corp Indonesia, sudah menyelesaikan kajian kerentanan dan risiko iklim serta perumusan strategi ketahanan kota sejak 2010. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dampak perubahan iklim yang teridentifikasi sudah dan akan secara lebih parah dirasakan oleh kota ini adalah banjir berulang, abrasi pantai dan peningkatan ketinggian permukaan air laut. Melalui skema Program ACCCRN pula, Kota Bandar Lampung telah menerima pendanaan untuk peningkatan kapasitas untuk implementasi beberapa proyek yang diturunkan dari hasil kajian dan strategi yang dirumuskan. Pada pertengahan tahun 2014 lalu, Kota Bandar Lampung baru saja melaksanakan diseminasi akhir proyek biopori yang terbilang cukup berhasil melihat penerimaan warga yang cukup baik untuk melanjutkan kegiatan serupa serta dukungan penuh dari pemerintah setempat untuk melakukan replikasi. Selain itu, di tahun 2014 pula Kota Bandar Lampung juga melaksanakan studi *Trash to Cash* yang terfokus pada studi kelayakan pengelolaan sampah melalui bank sampah agar dapat menjadi barang yang bernilai ekonomis sekaligus mendukung konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Saat ini kota Bandar Lampung masih menjalankan proyek edukasi yang berupaya menyisipkan materi perubahan iklim pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sekolah-sekolah terpilih di Kota Bandar Lampung. Melalui kerja sama dengan Program ACCCRN, Kota Bandar Lampung akan terus memperkuat kelembagaan agar dapat melakukan kaji ulang dan mengembangkan kajian kerentanan dan risiko iklim serta merumuskan strategi ketahanan kotanya secara berkelanjutan.

5.8 Kota Pekalongan

Kota Pekalongan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luasan wilayah sebesar 45,25 km² dengan 47 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan hasil cacah di tahun 2013 adalah 298.870 jiwa. Kota Pekalongan sudah memiliki kajian kerentanan skala kelurahan dan kota serta strategi adaptasi perubahan iklim yang penyusunannya disusun oleh Paklim-GIZ dan UN Habitat. Berdasarkan hasil kajian tersebut, teridentifikasi bahwa Kota Pekalongan rentan terhadap banjir (baik ROB maupun bandang) dan abrasi pantai dengan sektor paling rentannya adalah sektor perikanan. Setelah melakukan proses review terhadap dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah serta kajian dan strategi eksisting untuk menyusun strategi dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang komprehensif yang dapat diimplementasikan diimplementasikan, Kota Pekalongan lewat dukungan Mercy Corps Indonesia di bawah skema Program ACCCRN sedang dalam proses menerapkan strategi adaptasi yang telah disusun untuk diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan/*project*.

Sebagai salah satu daerah pesisir, Kota Pekalongan rentan pada banjir rob yang berdampak juga pada produktivitas perikanan, pertanian dan terganggunya ekosistem mangrove. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam pengelolaan dan Budidaya Perikanan yang Adaptif untuk Meningkatkan mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Kota Pekalongan. Kegiatan ini sejalan dengan strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota (ICCS) untuk peningkatan ruang terbuka hijau dan taman kota untuk pengembangan wisata mangrove dan gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon. Kegiatan ini sekaligus mendukung pengembangan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kota Pekalongan (PRPM) yang sudah lebih dulu ada. Proyek ini fokus terhadap alternatif media tanam mangrove menggunakan bronjong bambu dengan pengenalan mata pencaharian yang berkelanjutan lewat perikanan yang tahan rob dan banjir.

5.9 Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kawasan pesisir Utara Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki luas kawasan sekitar 373,3 km² dengan karakteristik topografi yang beragam dari daerah pesisir, dataran hingga pegunungan. Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2013 berjumlah 1.644.800 jiwa.

Semarang, di bawah kerangka kerja sama Program ACCCRN dari Mercy Corps Indonesia, sudah menyelesaikan kajian kerentanan dan risiko iklimnya pada tahun 2010. Berdasarkan hasil kajian kerentanan dan risiko iklim yang dilakukan, dampak perubahan iklim yang saat ini dan diproyeksikan kedepannya akan dirasakan oleh Kota Semarang antara lain badai, abrasi pantai, banjir yang terdiri atas banjir rob maupun banjir bandang, kekeringan dan keterbatasan air bersih, penyakit bawaan iklim serta peningkatan tinggi muka air laut yang diperparah dengan adanya pengambelasan tanah. Semenjak tahun 2010, lewat skema pembiayaan dari Program ACCCRN dari Mercy Corps Indonesia, Kota Semarang sudah melakukan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan implementasi beberapa proyek percontohan yang diturunkan dari dokumen strategi ketahanan kotanya. Proyek-proyek percontohan itu antara lain *flood forecasting, early warning system and community preparedness*, studi kelayakan untuk ekspansi sistem pemanenan air hujan, rehabilitasi mangrove dan pengembangan kegiatan perekonomian alternatif komunitas pesisir, dan sistem informasi dan peringatan dini kesehatan untuk Dengue. Melalui Program ACCCRN, Mercy Corps Indonesia akan terus memperkuat kelembagaan di Kota Semarang untuk dapat mengkaji ulang dan mengembangkan kajian kerentanan dan strategi ketahanan kotanya secara berkelanjutan. Saat ini Kota Semarang sudah memiliki *Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE)* yang dibangun dari keberadaan Tim Kota ACCCRN, sebagai lembaga *think tank* untuk membantu pemerintah kota untuk hal tersebut.

5.10 Kota Blitar

Kota Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 132.000 jiwa. Luas wilayah dari Kota 32,58 km² dan terbagi atas 21 Kelurahan. Sejak tahun 2010, Kota Blitar sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan workshop penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim serta pelatihan penyusunan strategi ketahanan kota yang diselenggarakan oleh Program ACCCRN – Mercy Corps Indonesia bekerja sama dengan APEKSI. Blitar telah menyelesaikan kajian kerentanan dan risiko iklimnya dan berdasarkan kajian tersebut, dampak perubahan iklim yang dominan dirasakan di Kota Blitar adalah penyakit bawaan iklim, penurunan produktivitas pertanian dikarenakan pola musim hujan yang berubah serta genangan dan/atau banjir. Kota Blitar sudah menyelesaikan strategi ketahanan kotanya dalam bentuk strategi terintegrasi antara adaptasi dan mitigasi, atau lebih dikenal dengan istilah *Integrated Climate Change Strategy* (ICCS) dengan mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh GIZ dan kemudian diperkuat dengan pendekatan dan metodologi perumusan kajian kerentanan dan risiko iklim serta strategi ketahanan kota yang dikembangkan oleh Program ACCCRN.

Dampak nyata yang telah dirasakan oleh kota ini adalah penurunan produktivitas buah belimbing yang merupakan salah satu komoditas utama hingga sampai hamper 50% (berdasarkan data tahun 2013). Perubahan iklim berdampak pada makin sulitnya memprediksi pergantian musim dan berpengaruh pada manajemen air setempat. Pertimbangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan proyek “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Karang Sari Melalui Peningkatan Produktivitas Buah Belimbing”.

5.11 Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu wilayah administratif dari kawasan andalan Malang Raya dan berlokasi di Pripinsi Jawa Timur. Luas kota Malang sendiri sebesar 100 km² yang terdiri atas 5 Kelurahan dan 57 Kecamatan. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2013 tercatat sebesar 836.373 jiwa.

Kota Malang, dengan bantuan dari KLH telah melakukan Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) di tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap tiga sektor utama, yaitu pengelolaan air, kesehatan dan pertanian, Untuk sektor pengelolaan air, Kota Malang memiliki tingkat risiko banjir yang cukup tinggi dikarenakan merupakan area bantaran dari lima aliran sungai.

Pada saat kajian dilakukan, 18,87% dari kawasan Kota Malang memiliki tingkat risiko banjir yang sangat tinggi, nilai ini diproyeksikan dapat meningkat hingga 80,23% sekiranya tidak dilakukan upaya signifikan dalam penanggulangan banjir. Disamping itu permasalahan laten terkait sistem drainase dan jaringan penyediaan air bersih juga menjadi salah satu tantangan di sektor pengelolaan air di kota ini. Permasalahan ketersediaan air bersih juga menjadi tantangan yang dihadapi kawasan Malang Raya pada umumnya dan kota

Malang pada khususnya dimana telah terjadi penurunan jumlah mata air dari 800 titik menjadi hanya tinggal 450 titik di wilayah ini di tahun 2011. Dalam upaya konservasi sumber daya air, pemerintah daerah setempat harus mempertimbangkan kapasitas dari DAS Brantas dimana upaya pembangunan harus menjadikan kondisi rill dan tantangan yang dihadapi kawasan DAS Brantas sebagai pertimbangan utamanya. Sementara itu di sektor kesehatan, keberadaan kawasan pemukiman kumuh dengan fasilitas sanitasi yang minim di sepanjang bantaran sungai meningkatkan tingkat risiko penyakit bawaan air mengingat tingginya potensi banjir di kawasan ini. Pemilihan lokasi dari fasilitas kesehatan yang mumpuni perlu dipertimbangkan secara cermat agar cakupannya dapat memfasilitasi kebutuhan seluruh kawasan. Isu lain yang terkait di kawasan Malang Raya, dan khususnya di Kota Malang adalah masih minimnya perhatian terhadap relasi antara perubahan (variabilitas) iklim terhadap insidensi penyakit demam berdarah, malaria dan diare, meskipun kasus yang terjadi cukup tinggi. Kondisi baseline kajian tersebut menjadi dasar dalam perumusan rencana aksi adaptasi bagi Kota Malang khususnya untuk penanganan banjir, longsor, kekeringan dan dampak perubahan iklim di sektor kesehatan. Sementara itu di sektor agrikultur, keberadaan lahan pertanian mengalami kompetisi yang cukup tinggi dengan peruntukan lahan lainnya, seperti pemukiman. RTRW yang berlaku saat ini sudah menunjukkan upaya membatasi alih konversi lahan pertanian, khususnya di Bakalan Krajan, untuk dapat diperuntukan sebagai lahan pertanian organik.

5.12 Kota Batu

Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki luas sebesar 189 km² dan terdiri atas tiga kecamatan dan 24 kelurahan dimana terbagi secara merata antara yang berlokasi di kawasan urban dan perdesaan. Berdasarkan pendataan dari BPS Kota Batu, jumlah penduduk Kota Batu di tahun 2013 sebesar 196.189 jiwa. Baik berdasarkan luas kawasan dan jumlah penduduk, Kota Batu dapat dikategorikan sebagai kota kecil.

Sama halnya dengan Kota Malang, Kota Batu juga sudah melakukan kajian KRAPI, lewat dukungan KLH di tahun 2012. Kajian KRAPI yang dilakukan uni mencakup kawasan Malang Raya yang terdiri atas kawasan administratif Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Berdasarkan kajian dampak iklim yang dilakukan terhadap tiga sektor utama, yaitu pengelolaan air, kesehatan dan agrikultur, di sektor pengendalian air bahaya iklim utama yang dihadapi kota ini adalah longsor dan banjir. Konservasi kawasan hutan dirasa dapat menjadi upaya untuk mengurangi risiko longsor, disamping keberadaannya yang juga dapat bermanfaat sebagai daerah tangkapan air bagi DAS Brantas. Sementara itu untuk menanggulangi permasalahan banjir, sistem drainase dan jaringan air bersih dipercaya perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas pelayanannya. Sementara itu di sektor kesehatan, sama halnya dengan Kota Malang, keberadaan kawasan kumuh dengan fasilitas sanitasi kurang layak di bantaran sungai menjadi permasalahan utama yang harus segera diatasi karena berpotensi meningkatkan risiko insidensi penyakit bawaan air ketika banjir

terjadi. Peningkatan akses yang merata terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu untuk mengurangi dampak perubahan iklim di sektor kesehatan. Di sektor agrikultur sendiri, Kota Batu sedianya memang dirancang sebagai pusat lumbung padi kawasan Jawa Timur dengan pengembangannya mencoba mengadopsi pendekatan agroplitan. Namun demikian, sektro agrikultur di kota ini menghadapi tantangan kompetisi lahan dengan aktivitas pariwisata, sementara itu di sisi lain produktivitas buah apel, yang merupakan komoditas utama kota ini, juga mengalami penurunan. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan terkait dampak perubahan iklim bagi lahan persawahan dan perkenbunan jagung sebagai dasar ilmiah yang cukup kuat dalam merumuskan strategi adaptasi sektor agrikultur di kawasan ini.

5.13 Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebesar 3.534 km² dengan pembagian wilayah administrasi yang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa (117 desa berlokasi di daerah perkotaan dan 273 berada di daerah perdesaan. Kabupaten Malang memiliki kajian risiko perubahan iklim dan strategi adaptasi (KRAPI) Malang Raya yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 dengan skala meso dan *single-hazard analysis*. Hasil kajian tersebut disebutkan sektor yang terkena atau terpapar adalah sektor sumber daya air dan pertanian, kesehatan dan dukungan sistem pendukung untuk penyediaan basis data iklim. Berdasarkan hasil kajian tersebut juga terpetakan lokasi prioritas pada setiap sektor terpapar dengan usulan intervensinya, yaitu (a) sektor sumber daya air dan pertanian berada di daerah hulu Daerah Aliran Sungai Brantas dengan usulan intervensi reboisasi di daerah tegalan dan *waste-area*, pengembangan *agro-industry*, pengembangan hutan masyarakat, dan pembangunan kolam untuk pengembangan sumber daya air dan pemulihan lahan; (b) sektor kesehatan dan penyediaan basis data ilmiah dengan usulan intervensi seperti rehabilitasi saluran drainase, saluran air hujan dan reservoir air bersih, serta melakukan standarisasi data iklim.

Dalam isu sumber daya air, hulu Sungai Brantas memiliki peran yang besar dalam menjaga ketersediaan kapasitas air di hilirnya. Permasalahannya adalah pembangunan kawasan perkotaan di hulu ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan peruntukan lahan yang akan berdampak terhadap ketersediaan air. Perubahan peruntukan lahan akan mengurangi daerah tangkapan air dan ketersediaan air tanah. Selain kebutuhan air yang meningkat pembangunan kawasan perkotaan tersebut juga akan mempengaruhi sektor pertanian, ekonomi dan kesehatan. Terkait dengan isu pertanian di Kabupaten Malang, seperti diketahui merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Bagaimanapun, produktivitas pada sektor ini sangat bergantung kepada kondisi iklim yang kemudian menjadi isu kunci terhadap hubungannya dengan perubahan iklim, intensitas hujan yang menyebabkan banjir pada lahan pertanian, perubahan pola musim, dan ketersediaan sumber air bagi lahan semakin menurun. Di sektor

kesehatan yang terdampak karena perubahan iklim, pada dasarnya variasi iklim, naiknya temperatur dan kelembaban diyakini menjadi penyebab atas beberapa kasus penyakit. Dalam hal ini seperti demam berdarah, malaria, dan diare. Status pada sektor kesehatan di Kabupaten Malang khususnya dan Malang Raya pada umumnya, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

5.14 Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota yang memiliki luas wilayah 250,8 km² ini terbagi atas 20 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 239.787 jiwa pada tahun 2013. Kota Tarakan telah memiliki kajian risiko perubahan iklim dan strategi adaptasi (KRAPI) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dampak perubahan iklim yang paling sering dirasakan di kota ini dan berpotensi mengalami trend peningkatan kedepannya adalah kekeringan, peningkatan tinggi permukaan air laut dan banjir. Sektor utama terdampak adalah sektor pesisir, sumber daya air dan kesehatan. Sebagai tindak lanjutnya, Mercy Corps Indonesia menjadikan Kota Tarakan sebagai kota replikasi Program ACCCRN untuk mendorong kota agar dapat mengimplementasikan aksi-aksi yang diturunkan dalam strategi adaptasi.

Berdasarkan kajian Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kelurahan Selumit Pantai merupakan zona merah sarang nyamuk *Aedes Aegypti* dimana 92,45% total kawasan tidak bebas jentik. Kerentanan terhadap sumber penyakit tropis ini tidak lepas dari dampak perubahan iklim. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bersama Program ACCCRN, Kota Tarakan melaksanakan kegiatan “Topi Anti DBD (TAD) Pada Penampungan Air Sebagai Upaya Preventif Pengendalian Vektor DBD di Kawasan Pemukiman Pesisir”. Kegiatan yang dilaksanakan hingga pertengahan 2015 ini akan menjadi langkah preventif yang penting karena peningkatan temperatur udara dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan vector DBD dan kegiatan ini berkesesuaian pula dengan strategi adaptasi dokumen KRAPI untuk sektor kesehatan. Fokus kegiatan ini adalah memberikan infrastruktur alternatif untuk mendukung pengendalian vektor penular DBD, yaitu dengan alat Topi Anti DBD yang berupa semacam penyaring atau penutup tendon air. Kelurahan Selumit Pantai sendiri merupakan salah satu daerah yang mengalami kesulitan air bersih sehingga hampir seluruh warga memiliki tempat penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dengan dilakukannya kegiatan ini, diharapkan dampak jangka panjangnya adalah dapat menurunkan angka kejadian penyakit DBD sebagai salah satu bentuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya perubahan iklim di sektor kesehatan.

6. Penutup dan Tindak Lanjut

6.1 Tindak Lanjut

Setahun setelah diterbitkan, RAN API masih memiliki beberapa tantangan yang perlu ditindak lanjuti. Masalah utama adalah koordinasi antar K/L dan koordinasi dengan daerah, saat ini terdapat cukup banyak institusi yang memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan adaptasi namun masih kurang terkoordinasi. Selain itu ada tantangan dalam pengarusutamaan API dalam rencana pembangunan sektoral dan lintas sektoral. Belum adanya indikator kinerja dan target yang terukur dalam RAN API serta terbatasnya ketersediaan data dan informasi iklim yang akurat menyulitkan proses perencanaan kegiatan dan anggaran terkait adaptasi perubahan iklim. Di samping tantangan yang disebutkan, RAN API sebagai referensi perencanaan juga masih belum menjelaskan mengenai konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat menuju resiliensi iklim; dan sinergi dengan RAN-GRK yang kini tengah ditinjau ulang. Berikut terdapat beberapa rekomendasi untuk para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektifitas RAN API. Rekomendasi ini diurutkan sesuai urgensinya dalam satu tahun ke depan:

1. Berdasarkan hasil Lokakarya Daerah Percontohan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai sinkronisasi program dan kegiatan K/L dengan ketersediaan serta kebutuhan program dan kegiatan API di daerah dengan acuan dokumen kajian kerentanan. Untuk memastikan sinkronisasi tersebut perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan di tingkat nasional dan melakukan review terhadap dokumen kajian kerentanan di daerah.
2. Melakukan fasilitasi pengarusutamaan RAN API ke dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap K/L tahun 2015-2019 dengan acuan RPJMN, di samping perlu dirumuskan juga keterkaitan RAN API dalam pemenuhan target dan sasaran Nawa Cita, khususnya di bidang ketahanan pangan, kemandirian energi dan perlindungan masyarakat dari bencana (konvergensi API-PRB).
3. Perlu melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar K/L dalam usaha pencapaian sasaran dan target RAN API sebagai konsekuensi atas dileburnya DNPI dan BP-REDD ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dibentuknya Ditjen Perubahan Iklim di dalamnya, serta restrukturisasi di beberapa kementerian yang sedikit banyak akan mempengaruhi implementasi RAN API.
4. Antar K/L secara bersama perlu menyepakati sistem monitoring dan evaluasi yang akan digunakan dalam RAN API dan bekerjasama dalam pengelolaan data dan informasi untuk kajian risiko iklim, serta mempercepat implementasi di daerah percontohan RAN API.
5. Melakukan penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim bagi provinsi yang belum memiliki, hal ini dibutuhkan untuk memetakan kerentanan dan risiko iklim secara

nasional. Dengan ini diharapkan prioritas dan alokasi sumberdaya dalam perencanaan dan implementasi RAN API dapat lebih tepat sasaran.

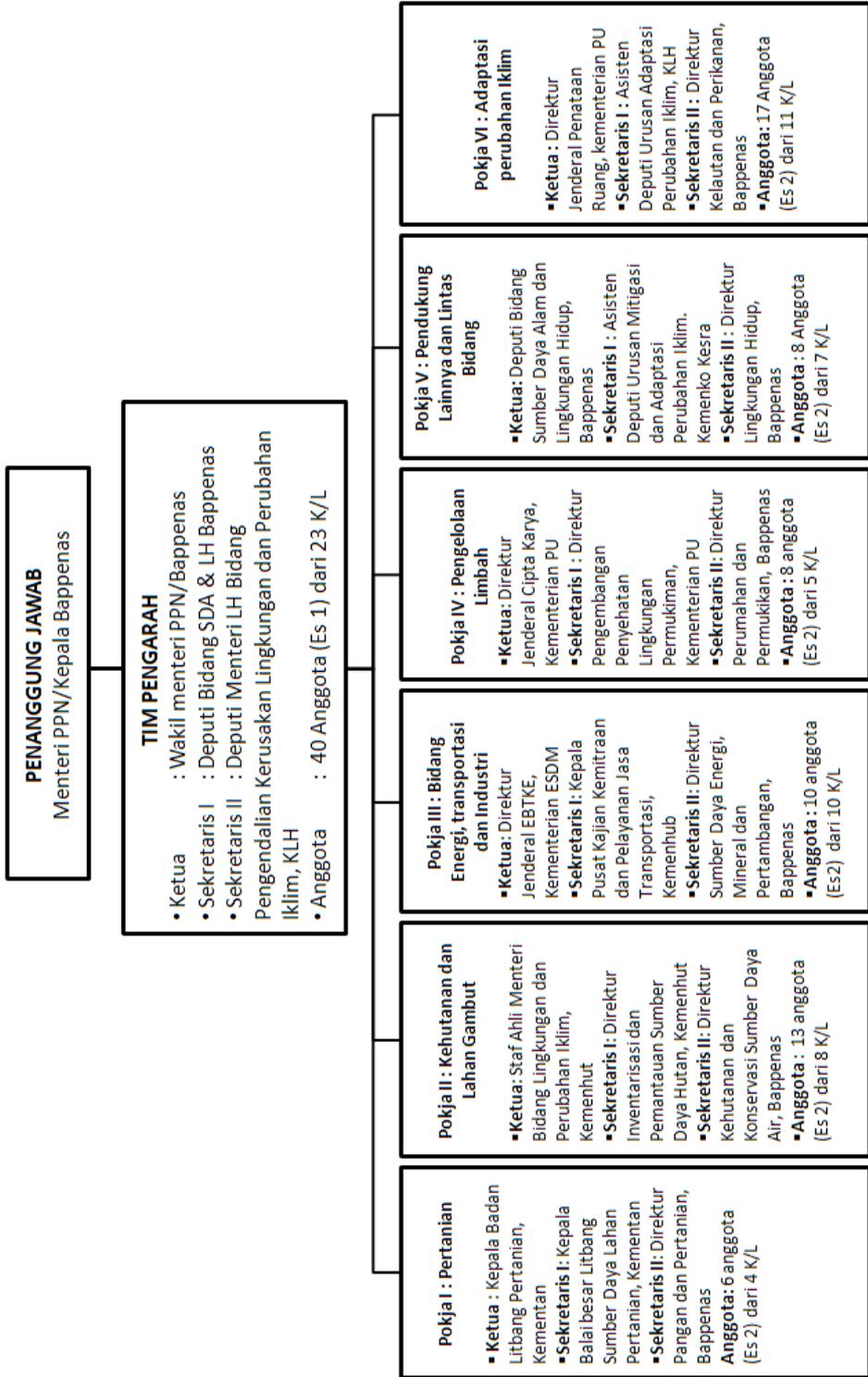
6. Untuk menunjang keberhasilan aksi adaptasi yang dilakukan pemerintah, perlu dikembangkan strategi pemberdayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap resiliensi iklim dan bencana di setiap daerah.

6.2 Program Satu Tahun Ke Depan

Selama tahun 2015 telah disusun rencana kerja Sekretariat RAN API terkait dengan implementasi RAN API tahun 2015-2019. Untuk mendukung implementasi tersebut, pengarusutamaan terus dilakukan terutama pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2016, di samping pengembangan SIDIK dan indikator bidang RAN API di dalam skema monitoring dan evaluasi.

Lampiran

Struktur Tim Penanganan Perubahan Iklim
SK Menteri Bappenas No 38/M.PPN/HK/03/2012



Tim Penyusunan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di Pusat dan Daerah

KOTA SEMARANG			
Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/109/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Strategi Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim Kota Semarang Masa Bakti 2014-2016			
NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Bambang Haryono	BAPPEDA Kota Semarang	Ketua
2	Ir. Purnomo DS, MM, MT	BAPPEDA Kota Semarang	Ketua Harian
3	Ir. Gunawan Wicaksano	Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang	Sekretaris
4	Nik Sutiyani, St, MT	BAPPEDA Kota Semarang	Anggota
5	Safrinal Sofaniadi, ST, M.Si	BAPPEDA Kota Semarang	Anggota
6	M. Luthfi Eko Nugroho, ST	BAPPEDA Kota Semarang	Anggota
7	Ir. Suhardjono, M.Eng	Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang	Anggota
8	Muji Bagus	Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang	Anggota
9	Hermawan	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
10	Teti Indrawati W, ST	Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang	Anggota
11	dr. Mada Gautama	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
12	Glory Nasarani, ST, MT, M.Sc	Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
13	Puji Karyadi, S.Pt, M.Si	Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
14	Budi Prakosa, ST, MT	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang	Anggota
15	Ari Helmi Ferdiansyah, ST	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang	Anggota
16	Drs. Mujoko Raharjo, MT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
17	Drs. Joko Santosa, M.Si	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang	Anggota
18	Akhmad Dani Mulyani, ST	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang	Anggota
19	Hari Murni	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang	Anggota
20	Reni Kraningtyas, M.Si	Stasiun Klimatologi Klas 1 Semarang	Anggota
21	Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP	Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Anggota
22	Feri Prihantoro, ST	Yayasan BINTARI	Anggota

KOTA TARAKAN		
Keputusan Walikota Tarakan Nomor 660.1/HK-V/205/2014 tentang Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tarakan Tahun 2014		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Tarakan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Ketua
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Tarakan	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan	Sekretaris
5	Bappeda Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam ● Kasubid. Sumber Daya Alam 	Anggota
6	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Pengendalian Pencemaran ● Kabid. Pengendalian Perusakan ● Kabid. Tata Lingkungan 	Anggota
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan ● Kabid. Kedaruratan, Logistik, dan Pemadam Kebakaran 	Anggota
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Pengairan dan Sumber Daya Alam ● Kabid. Cipta Karya 	Anggota
9	Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Kebersihan ● Kasubid. Air Limbah 	Anggota
10	Dinas Kesehatan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ● Kasi. Pengendalian Pencegahan Penyakit ● Kasi. Penyehatan Lingkungan 	Anggota
11	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Kehutanan ● Kabid. Pertambangan dan Energi 	Anggota
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Kelautan dan Pesisir 	Anggota
13	Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Tanaman Pangan dan Perkebunan ● Kabid. Bina Usaha dan Penyuluhan 	Anggota
14	Dinas Perhubungan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Perhubungan Darat ● Kabid. Perhubungan Laut dan Udara 	Anggota
15	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabid. Informasi dan Dokumentasi 	Anggota
16	Bagian Pembangunan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ● Kabag. Pembangunan ● Kasubag. Analisis dan Kajian Pembangunan 	Anggota
17	Direktur PDAM Kota Tarakan	Anggota

KOTA TARAKAN		
18	Kepala BMKG Kota Tarakan	Anggota
19	Kepala BASARNAS Kota Tarakan	Anggota
20	Akademisi Universitas Borneo	Anggota
21	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	Anggota
22	PT. Intracawood Mfg	Anggota
23	PT. Medco E&P Tarakan	Anggota
24	PT. Pertamina Asset 5-Tarakan	Anggota
25	PT. Idec AWI	Anggota
26	PT. Mustika Minanusa Aurora	Anggota
27	Advokasi Konservasi Flora dan Fauna Tarakan	Anggota

KOTA PROBOLINGGO		
Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 185.45/87/KEP/425.012/2014 tentang Komite Pengarah dan Komite Teknis Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Kota Probolinggo		
NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
A. KOMITE PENGARAH		
1	Walikota Probolinggo	Pelindung
2	Wakil Walikota Probolinggo	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo	Wakil Pengarah
5	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	Ketua
6	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	Sekretaris
7	a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo c. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo d. Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo h. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo	Anggota
B. KOMITE TEKNIS		
1	Kepala Bidang Pelestarian, Pengendalian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	Koordinator
2	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo	Wakil Koordinator
3	Kepala Subbidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pelestarian, Pengendalian, dan Pengembangan Kapasitas	Sekretaris

KOTA PROBOLINGGO

4	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggob. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggoc. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggod. Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Koperasi, Energi Mineral, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Probolinggoe. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggof. Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Probolinggog. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kota Probolinggoh. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggoi. Kepala Bidang Advokasi dan Penyuluhan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggoj. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggok. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggol. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggom. Kepala UPT Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggon. Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggoo. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggop. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggoq. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup pada Bidang dan Penataan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggor. Kepala Subbidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang Pelestarian, Pengendalian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggos. Kepala Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Kota pada Bidang Penataan Kota dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggot. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggou. Kepala Bagian Teknis pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggov. Kepala Bidang Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggow. 14 (empat belas) orang Staf pada Bidang Pelestarian, Pengendalian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	Anggota
---	---	---------

KOTA PEKALONGAN		
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050/046/2014 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.5/112/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Pekalongan		
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A. KOMITE PENGARAH		
1	Walikota Pekalongan	Penanggungjawab I
2	Wakil Walikota Pekalongan	Penanggungjawab II
3	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua
4	Asisten II Sekda Kota Pekalongan	Wakil Ketua
5	Kepala KLH Kota Pekalongan	Sekretaris
6	a. Kepala DINDIKPORA Kota Pekalongan b. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan c. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan d. Kepala DPU Kota Pekalongan e. Kepala DISHUBPARBUD Kota Pekalongan f. Kepala DPPK Kota Pekalongan g. Kepala DISPERINDAGKOP UMKM Kota Pekalongan h. Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekalongan	Anggota
B. KOMITE TEKNIS		
1	Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2	Kepala KLH Kota Pekalongan	Ketua
3	Kasubag. Tata Usaha pada KLH Kota Pekalongan	Sekretaris
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan • Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan • Kabid Sarana dan Prasarana pada DINDIKPORA Kota Pekalongan • Sekretaris pada DPPK Kota Pekalongan • Kabid. Lalu Lintas pada DISHUBPARBUD Kota Pekalongan • Kabid. Angkutan pada DISHUBPARBUD Kota Pekalongan • Kabid. Kebersihan dan Persampahan pada DPU Kota Pekalongan • Kabid. Anggaran pada DPPKAD Kota Pekalongan • Kasubbid. Ekonomi pada BAPPEDA Kota Pekalongan • Kasubbid. Pengendalian Program BAPPEDA Kota Pekalongan • Kasi. Penyehatan Lingkungan pada DKK Kota Pekalongan • Kasi. Bina Bangunan pada DPU Kota Pekalongan • Kabag. Hubungan Langgan pada PDAM Kota Pekalongan • Kasi. Usaha Tani pada DPPK Kota Pekalongan • Kasubid. Pemberdayaan Masyarakat pada BPMP2AKB dan KP Kota Pekalongan • Kasi. Sarana dan Prasarana Pesisir dan Kelautan pada DPPK Kota Pekalongan • Kasi. Amdal pada KLH Kota Pekalongan • Kasi. Monitoring dan Pemulihan Lingkungan pada KLH Kota Pekalongan • Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada KLH Kota Pekalongan • Kasi. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Kantor Satpol PP Kota Pekalongan 	Anggota

KOTA PEKALONGAN

<ul style="list-style-type: none"> ● Staf Bidang Perindustrian pada DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Pekalongan ● Staf Bidang Kebersihan dan Persampahan pada DPU Kota Pekalongan ● 4 (empat) orang Staf pada KLH Kota Pekalongan ● Dosen Tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat pada UNIKAL ● Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan ● Yayasan Bintari ● Ketua Kelompok Tani Muara Rejeki ● Ketua Kelompok Tani Layur ● Ketua Kelompok Tani Bumiku ● Ketua Kelompok Tani Mapan 	Anggota
--	---------

KOTA CIREBON

Keputusan Walikota Cirebon Nomor 365.05/KEP.150-BAPPEDA/2014 tentang Pembentukan Tim Kota Perubahan Iklim Kota Cirebon

NO	NAMA	SUSUNAN KEANGGOTAAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Penanggung Jawab 1
2	Ir. Yoyon Indrayana, MT	Penanggung Jawab 2
3	Abing Rijadi, ST	Ketua
4	Eddy Soemarno, ST	Anggota
5	Aty Hermawaty, ST	Anggota
6	Novid Gumelar, ST, M.Eng	Anggota
7	DR. Dedi Supriyadi, API	Anggota
8	Fina Amalia Purwantini, ST, M.Si	Anggota
9	Hendra Irawan, ST	Anggota
10	Sisca Octasari, ST, M.Si	Anggota
11	Torikin, SKM	Anggota
12	Listianingrum, ST, M.Si	Anggota

KOTA PALEMBANG

Keputusan Walikota Palembang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN
A. TIM PENGARAH		
1	Walikota Palembang	Tim Pengarah
2	Wakil Walikota Palembang	Tim Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Palembang	Tim Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang	Tim Pengarah
B. TIM PELAKSANA		
1	Ir. H.M. Tabrani, MM Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator

KOTA PALEMBANG		
2	Ir. Reni Sefriany, MT Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
3	Nyimas Ida Apriani, ST, MT Kasubbid Pengendalian Kerusakan Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
4	M. Yunus, S.Pd., M.Kes Kasubbid Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
5	Nyimas Eviyani, S.Si Kepala Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
6	Yulia Mariska, ST Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
7	Guto Febriano, ST Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Koordinator
8	Zuryati Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang	Tim Koordinator
9	M. Utih, SH Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang	Tim Koordinator
10	Drs. Yudi Asnandar, ST Staf Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang	Tim Koordinator
11	Eni Amtatulusi, S.ST Staf Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang	Tim Koordinator
12	Poppy Augustina L, ST, MT Kepala Seksi Pengembangan dan Tata Ruang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang	Tim Koordinator
13	Zulkifli, ST, M.Si Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang	Tim Koordinator
14	Ir. H. Bahrum, M.Si Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Palembang	Tim Koordinator
15	Mumuh Muzakar, S. Hut Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Palembang	Tim Koordinator
16	Zulfahmi, ST Pengawas Taman Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang	Tim Koordinator
17	Ali Mukron, ST Manager Produksi dan Pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kota Palembang	Tim Koordinator
18	Noveriansyah, ST Kepala Shift IPA Ogan Bagian Produksi dan Pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kota Palembang	Tim Koordinator
19	Neni Trisia, ST, M.Si Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebersihan Kota Palembang	Tim Koordinator

KOTA PALEMBANG		
20	Edi Martha, SE Kepala Seksi Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kota Palembang	Tim Koordinator
21	Aldrin, ST Kepala Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang	Tim Koordinator
22	Dra. Wati Purnamasari, M.Si Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang	Tim Koordinator
23	Renny Indah Lestary, S.STP, MM Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang	Tim Koordinator
24	Agnes Indra Maharani, S. Hut, M.Si Staf Balai Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Kehutanan Republik Indonesia	Tim Koordinator
25	Ir. Erna Yuliwati, Ph.D Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Bina Dharma	Tim Koordinator
26	Aang Kurniawan Yayasan Pengembangan Inovasi Warga Mandiri Sejahtera	Tim Koordinator
1	Drs. Edwin Effendi, M. Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
2	Siti Emma Sumiatul, S. Sos, M.Si Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
3	Eka Gustini, ST, M.Sc, M.Si Kepala Seksi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
4	Armansyah, ST Kepala Seksi Pembanunan Kebersihan Lingkungan Masyarakat	Tim Sekretariat Penelitian
5	Khoidir Staf Dinas Kesehatan Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
6	Korlena, ST, MT Staf Bidang Perencanaan Strategis dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
7	Emil, ST Staf Pengembangan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
8	RM. Najamuddin, SP Pengawas Taman Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
9	Andi Bungkar Jutawan, SE Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang	Tim Sekretariat Penelitian
10	Vebri Al Tintani Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan	Tim Sekretariat Penelitian
11	Ekawati Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan	Tim Sekretariat Penelitian

KOTA BLITAR

Keputusan Walikota Blitar Nomor 188 / 978 / HK / 410.010.2 / 2014 tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Blitar Tahun Anggaran 2014

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Muh. Samanhuri Anwar	Walikota Blitar	Penanggung Jawab
2	H. Purnawan Buchori	Wakil Walikota Blitar	Wakil Penanggung Jawab
3	Drs. Santoso, M.Pd	Sekretaris Daerah Kota Blitar	Pengarah
4	Drs. EC. Setija Basuki	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Blitar	Wakil Pengarah
5	Drs. EC. Priyo Istanto	Kepala Bappeda Kota Blitar	Ketua
6	Pande Ketut Suryadi, SH	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar	Wakil Ketua
7	Ir. Herlyn Krisnawati, MM	Kabid. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Kota Blitar	Sekretaris
8	a. Kenyo Anggun P., ST	Kasubid Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM, dan Perhubungan Bappeda Kota Blitar	Sekretariat
	b. Setya Wiratna, ST	Kasubid Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang Bappeda Kota Blitar	
	c. Wikan Nurtia E., ST	Staf Bappeda Kota Blitar	
	d. Sudarwanto, SE	Staf Bappeda Kota Blitar	
9	a. Purwanto, AP	Kabid Perencanaan, Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Bidang Perencanaan
	b. Dindin Alinurdin, AP	Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar	
	c. Jety Novita H., S. Pt	Kasi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kota Blitar	
	d. Lilik Yuli S., ST	Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar	
	e. Didik Hartoyo, S. Sos	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Bapemas & KB Kota Blitar	
	f. Yusuf Ali Cahyadi, S.Si.T	Kasi. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Blitar	
	g. Indra Kurniawati, S.Pd	Staf Bappeda Kota Blitar	
	h. Luhur Aditya P.	P4S Akar Ijo	

KOTA BLITAR				
10	a.	Parminto, S.Sos., M.Si	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Kota Blitar	Bidang Implementasi dan Advokasi
	b.	Bambang Sucipto	Kabid Persampahan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar	
	c.	Denny Eko P., ST	Kasubid Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar	
	d.	dr. Dissie Laksomonowati A	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar	
	e.	Ir. Fauzun Daroini	Koordinator Penyuluh Pertanian – Dinas Pertanian Kota Blitar	
	f.	Ika Hadi Wijaya, SH	Kasubag Peraturan perundang-Undangan Setda Kota Blitar	
	g.	Mujianto, S.Sos., M.Si	Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Blitar	
	h.	Yuliana Amalia, A.Md	Staf Dinas Kesehatan Kota Blitar	
	i.	Dra. Tri Retno Ananingtyas	PDAM Kota Blitar	
	j.	Tita Wulandari	Radio Mayangkara	
	k.	Drs. Eko Wihadi	Karang Taruna Kota Blitar	
l.	Ny. Gatut Haririswanto	Pokja III PKK Kota Blitar		
11	a.	Elly Tartati Ratni, S. Tp	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Blitar	Bidang Monitoring dan Evaluasi
	b.	Darul Efendi, SE	Kasubag Potensi Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar	
	c.	Gigih Mardana, S.Sos., M.Si	Kasubag Humas Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar	
	d.	Ainur Rofiqoh, S.STP, M.Si	Kasubid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kota Blitar	
	e.	Widhi Astuti, ST	Kasi Pengendalian dan Monitoring Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	f.	Suharto, S.Sos	Kasubid Penanggulangan Bencana Alam Bakesbangpol dan BPD Kota Blitar	
	g.	Iwan Buyung W.	Forum Kota Hijau	
	h.	Endang P.	Pegiat Lingkungan Hidup	
	i.	Sri Winarni, S. Pd, M.Kes	Forum Kota Sehat	
	j.	Dedith Agung, ST	Fasilitator P2KP	

KOTA BANDAR LAMPUNG			
Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor ... tentang Pembentukan Tim Koordinasi Ketahanan Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung			
NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Badri Tamam	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Ketua
2	Ir. Pola Pardede	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3	Ir. Daniel Marsudi	Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung	Sekretaris
A. KELOMPOK KERJA PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI			
1	Aryanto	Direktur Eksekutif PUSSEBIK	Koordinator
2	Ir. Tole Dailami	Sekretaris Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
3	Desti Mega Putri, SP, MT	Kabid Fisik Prasarana Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
4	Dini Purnamawaty, SE, M.Si	Irban Inspektorat Kota Bandar Lampung	Anggota
5	Erwin SH. MH	Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung	Anggota
6	H. A Azwar, ST	Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota
7	Ery Adityawan, ST	Staf Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
B. KELOMPOK KERJA KEMITRAAN			
1	Herza Yulianto	Pemerhati Lingkungan	Koordinator
2	Hendrawan	Pemerhati Lingkungan	Anggota
3	Bejoe Dewangga	Direktur Eksekutif WALHI Lampung	Anggota
4	Eko Sulistianoro, SH	Direktur Eksekutif Watala	Anggota
5	Mashabi	Direktur Eksekutif Mitra Bentala	Anggota
6	Martalena Sani, SH	Sekretaris BPPLH Kota Bandar Lampung	Anggota
7	Ir. Andrya Yunila Hastuti, M.Si	Kabid Ekonomi Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
8	Tony Ferdinansyah, ST, MT	Kasi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung	Anggota

KOTA BANDAR LAMPUNG			
C. KELOMPOK KERJA LITBANG DAN PERENCANAAN PROGRAM			
1	Maulana Mukhlis, S. Sos., M. IP	Dosen Ilmu Pemerintahan UNILA	Koordinator
2	Dr. Eng. Admi Syarif	Ketua LP UNILA	Anggota
3	Ir. Citra Persada, MT	Wakil Ketua IAP Lampung	Anggota
4	Suhendri	Pemerhati Lingkungan	Anggota
5	Chepi H.Saputra, ST, MT, MPP	Kasubid Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
6	Tri Atmaningsih	Kasi Produksi Pertanian Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	Anggota
7	Gunarti Kumarasari, ST	Kasubag Administrasi dan Teknik PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	Anggota
D. KELOMPOK KERJA PELAPORAN DAN EVALUASI			
1	Dirmansyah, ST, MPSDA	Kabid Statistik dan Penelitian Bappeda Kota Bandar Lampung	Koordinator
2	Ir. Maidasari, MM	Kabid Pemerintahan dan Kesehatan Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota
3	Ir. Andestina	Ka. Bid. Kehutanan Dinas Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Bandar Lampung	Anggota
4	Ahmad Wahyudi, ST	Kasubag Program Monitoring dan Evaluasi BPPLH Kota Bandar Lampung	Anggota
5	Setiawan Batin, ST, MT	UPT Dinas Kebersihan	Anggota
6	Fitro Siswoyo, ST	Staf Dinas PU Kota Bandar Lampung	Anggota
7	Evi Rahmalia, S.Pi., M.Si	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Anggota
8	Fitria, ST	Staf Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota

